

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SLEMANDALAM  
PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**NIKKO WEDA PRADEKA**

**N P M : 120511027**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM  
PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI**




**Diajukan oleh :**

**NIKKO WEDA PRADEKA**

**N P M : 120511027**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pradilan Pidana**

**Dosen Pembimbing**


  
**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Nikko Weda Pradeka**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Email : [nikkoweda@yahoo.com](mailto:nikkoweda@yahoo.com)**

## **Abstract**

*Judiciary as one of the law enforcement agencies are required to do more to uphold the rule of law, protection of public interest, upholding human rights, and the eradication of corruption, collusion and nepotism. in line with the demands of reform, combating corruption is one of the main agenda and the main task to be carried out by the Judiciary.*

*Sleman District Prosecutor Intelligence role in the eradication of corruption cases in Sleman is to conduct an investigation which preceded the event information indicative of corruption. Further followed by the creation and issuance of a warrant. Implementing Intelligence data collection and the collection of information materials.*

**Keywords : Prosecutor Intelligence, Judiciary, Corruption**

## 1.1 PENDAHULUAN

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga harus diberantas.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda utama pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Korupsi sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia.

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat modern dewasa ini korupsi justru berkembang dengan cepat. Sekalipun dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit tanggulasi dan pemberantasannya.

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepiantas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.<sup>2</sup>

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi

yang bermilyar rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil, hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi tidak lepas dari peran kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan

<sup>1</sup> Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 2..

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan.

Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia.

Kejaksaan Negeri Sleman sebagai salah satu unit kerja Kejaksaan Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Sleman melalui seksi Intelijennya secara nyata dan sungguh-sungguh telah melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Intelijen kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam proses penyidikan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dugaan tindak pidana korupsi. Semua kebijakan-kebijakan pimpinan terkait strategi pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) telah direalisasikan dengan kegiatan nyata di lapangan. Meskipun Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam prektiknya tidak mudah bagi Kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan personil atau SDM khususnya Jaksa Intelijen yang bertugas dan modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka dan orang-orang disekitar yang melindunginya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

## 1.2 METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ada metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data skunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari pihak atau ahli terkait dengan penulisan hukum ini.

### Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

### Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Intel pada Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu Bambang Rudi Hartoko, S.H., Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman.

### Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

### 1.3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial (penyelidikan) oleh jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dapat dipaparkan sebagai berikut : Segera setelah seksi intelijen mendapatkan informasi (laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman. Kajari kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dengan permintaan untuk dibuat telaahan.

Telaah intelijen ini memuat pokok permasalahan, uraian permasalahan, telaahan, kesimpulan, dan saran tindak. Bilamana informasi yang diperoleh tersebut dirasa belum lengkap, maka dalam saran tindak penelaah mengajukan saran kepada pimpinan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (IN.3). Apabila dalam telaahan intelijen, penelaah berkeyakinan bahwa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut besar kemungkinannya memang terjadi (informasi A1), maka penelaah memberikan saran tindak kepada pimpinan agar informasi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan intelijen.

Pelaksana intelijen melakukan kegiatan penyelidikan intelijen dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dengan menggunakan teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen (intelligence device). Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan atau mengadakan wawancara dengan seseorang.

Setelah segala sesuatunya dipandang cukup, maka dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah berakhirnya surat perintah, Tim Pelaksana Intelijen (Tim Penyelidik) menyusun dan membuat Laporan Operasi Intelijen Yustisial (L.IN.4).

Ketua tim pelaksana intelijen melalui Kasi Intel menyampaikan Lapopsinyus (L.IN.4) kepada user (Kajari) dengan Nota Dinas. Laporan operasi intelijen yustisial tersebut diserahkan

dengan dilampiri Matrik Hasil Operasi Intelijen Yustisial (L.IN.8). Setelah Kepala Kejaksaan Negeri Sleman membaca, mempelajari, dan mencermati isi laporan tersebut berpendapat perlu untuk dilakukan ekspos, maka pelaksana intelijen menyiapkan bahan ekspos dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima petunjuk/disposisi dari Kajari.

Setelah operasi intelijen yang telah dilaksanakan mendapatkan suatu kesimpulan, selanjutnya Kajari memerintahkan Kasi Intel untuk membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi DIY dalam bentuk Laporan Intelijen Khusus (L.IN.3). Biasanya, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara yang besar dan/atau memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka Kejaksaan Tinggi DIY meminta kepada Pelaksana Intelijen agar melakukan gelar perkara (ekspos) di Kejati, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil gelar perkara (ekspos) di Kejati tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Pelaksana Intelijen dalam menentukan hasil akhir kegiatan operasi intelijen (penyelidikan).

Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah “ditingkatkan ke tahap penyidikan”, maka Kasi Intel akan melimpahkan penanganan perkara tersebut ke seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) disertai dengan berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara ke Seksi Pidsus, maka tugas dan tanggung jawab pelaksana intelijen dalam kegiatan operasi intelijen (penyelidikan) berakhir sudah.

Terkait dengan Kendala Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Sleman, Penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejari Sleman tidak semuanya dapat berjalan mulus, dalam prosesnya terkadang Tim Pelaksana Intelijen mengalami hambatan atau kendala, diantaranya yaitu:

1. Jadwal pemeriksaan (permintaan keterangan) berbenturan dengan jadwal sidang para Jaksa (anggota tim penyelidik);
2. Modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka dan orang-orang disekitar yang melindunginya;
3. Personil intelijen yang masih kurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif karena



banyak dari personil yang belum mengikuti pendidikan intelijen; dan

4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Intelijen Kejaksaan.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Jadwal pemeriksaan (permintaan keterangan) disusun saling menyesuaikan dengan jadwal sidang para jaksa sehingga keduanya tidak berbenturan;

2. Mengoptimalkan personil intelijen yang ada;

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;

4. Meningkatkan sumber daya manusia personil intelijen dengan cara mengikutsertakan personil dalam berbagai kegiatan seminar in house training, workshop, dan diklat;

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis berpendapat bahwa pada dasarnya kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan khususnya pada Kejaksaan Negeri Sleman adalah kendala mengenai sumber daya manusia, teknis intelijen, sarana dan prasarana serta anggaran, sehingga kendala-kendala ini bisa berpengaruh terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sleman.

#### 1.4 KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penyelidikan yang diawali adanya informasi indikasi peristiwa korupsi. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penerbitan surat perintah. Pelaksana Intelijen melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Data dan bahan keterangan yang berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan

ke pimpinan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan menentukan langkah berikutnya.

2. Kendala Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman antara lain, jadwal pemeriksaan berbenturan dengan jadwal sidang para Jaksa, modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka, personil intelijen yang masih kurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Intelijen Kejaksaan.

#### 1.5 REFERENSI

##### Buku :

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

